

**OPTIMALISASI REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA  
PEMBAHARUAN AGRARIA**  
(Study Program Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Mempawah)”

Oleh :

**TITIK KURNIA WATI, S.ST**  
**A.21212066**

**Pembimbing I : Dr. Firdaus, S.H, M.Si**  
**Pembimbing II :Edy Suasono, SH., M.Hum.**

**ABSTRACT**

This thesis addresses the issue of purchase covert (undercover buy) a disclosure strategy narcotics (juridical-empirical studies in Pontianak) .This method used in this study is a qualitative research method using Normative-sociological approach. Covert purchase as regulated Act No. 22 of 1997 which has been changed to Law No. 35 of 2009 is the addition of investigator powers in efforts to combat drug trafficking. This is because the narcotic crime is organized crime, secret, as well as in the implementation modus operandi and quite sophisticated technology making it difficult to collect the evidence. In contrast to other offenses of purchasing shrouded in narcotic crime is not against the Human Rights when implemented in accordance with applicable regulations. This is because the narcotic crime is organized crime, secret, as well as in the implementation modus operandi and quite sophisticated technology making it difficult to collect the evidence. In contrast to other offenses of purchasing shrouded in narcotic crime is not against the Human Rights when implemented in accordance with applicable regulations. However, it would be different if it is not carried out in accordance with applicable regulations. This is because that in the implementation of covert purchases can not be separated and community participation, so that people who participate must be protected rights. To reduce errors and execution of the covert purchase it is necessary to be known and understood clearly by the investigator on the implementation of the purchase itself disguised as stipulated in Law No. 35 of 2009. The recommendation of this study is the need to be undertaken a revision of Law No. 35 Year 2009 on Narcotics itself in order to clarify what is the purchase of a veiled and how the actual implementation and the need to educate more people programmatically, for the use of informants to impersonate let conducted training Special to the investigator who was assigned to make the purchase is shrouded in a narcotics detective. and provide security to the people that specifies the information to the officer.

**Keywords: disclosure strategy, narcotics, Purchase veiled.**

**ABSTRAK**

Tesis ini membahas masalah pembelian terselubung (undercover buy) sebagai strategi pengungkapan kejahatan narkoba (studi yuridis-empiris di Kota Pontianak).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Normative-Sosiologis. Pembelian Terselubung sebagaimana diatur Undang-Undang No 22 Tahun 1997 yang telah diganti menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 merupakan penambahan kewenangan penyidik dalam upaya pemberantasan pengedaran narkoba. Hal ini

mengingat tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang terorganisasi, rahasia, serta dalam pelaksanaannya menggunakan modus operandi dan teknologi yang tergolong canggih sehingga sulit dalam mengumpulkan barang buktinya. Berbeda dengan tindak pidana lainnya pelaksanaan pembelian terselubung dalam tindak pidana narkoba tidaklah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia bila dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, akan menjadi berbeda bila tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan bahwa dalam pelaksanaan pembelian terselubung tidak terlepas dan peran serta masyarakat, sehingga masyarakat yang ikut serta harus dilindungi hak-haknya. Untuk mengurangi kesalahan dan pelaksanaan pembelian terselubung tersebut maka perlu diketahui dan dipahami secara jelas oleh penyidik tentang pelaksanaan pembelian terselubung itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu kiranya dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba itu sendiri guna memperjelas apa itu pembelian terselubung dan bagaimana sebenarnya pelaksanaannya dan perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat secara terprogram, untuk penggunaan informan untuk menyamar hendaklah dilakukan pelatihan secara khusus kepada penyidik yang memang bertugas untuk melakukan pembelian terselubung dalam suatu reserse narkoba. dan memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat yang memberikan informasi kepada petugas.

**Kata Kunci:** strategi pengungkapan, kejahatan narkoba, Pembelian terselubung.

## Latar Belakang

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan kekayaan nasional dan harus dikelola secara optimal. Hubungan Bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang kekal dan abadi. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan tempat hidup, tempat dimana manusia berasal dan dikuburkan, dalam hal ini tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan ekologis. Indonesia adalah negara agraris, ditandai dengan pertanian sebagai salah satu sektor yang menjadi basis perekonomian bangsa. Hal ini dapat dipahami dari kenyataan empiris yang menunjukkan bahwa sebagian besar dari penduduk Indonesia mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian, baik sebagai petani yang memiliki tanah ataupun petani yang tidak memiliki tanah (buruh tani).<sup>1</sup>

Mengingat arti pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia, dan sebagai awal mula terciptanya kebutuhan pangan maka diperlukan pengaturan yang lengkap mengenai penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa permasalahan pertanahan mengenai pemilikan maupun perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya. Pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno dalam pidatonya "Penemuan Kembali Revolusi Kita" menegaskan perlunya perombakan dalam permasalahan pertanahan sebagai usaha menata perekonomian nasional. Presiden mengatakan "Tanah untuk mereka yang betul-betul menggarap tanah. Tanah tidak untuk mereka yang dengan duduk ongkang-ongkang menjadi gemuk gendut karena menghisap keringat orang-orang yang diserahi menggarap tanah". Menindaklanjuti pidato tersebut para pemimpin negara mulai memikirkan langkah perombakan terhadap hukum tanah dari hukum tanah kolonial menjadi hukum tanah nasional, dengan tujuan masyarakat dapat keluar dari kesulitan-kesulitan ekonomi dan membangun basis agraria yang kuat dalam negeri.<sup>2</sup>

Undang-Undang Pokok Agraria<sup>3</sup> merupakan sumber pokok segala kebijaksanaan untuk menata masalah pertanahan, meningkatkan produksi, taraf hidup dan kesejahteraan

---

<sup>1</sup> Nyoman Budijaya, *Tinjauan Yuridis Tentang Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Pelaksanaan Landreform* (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal 1

<sup>2</sup> Pidato Presiden Soekarno, "Penemuan Kembali Revolusi Kita" dalam *Amanat Proklamasi III, 1959-1960*, PT Idayu Press, Jakarta 1986. Hal 116

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

sosial masyarakat, selain itu UUPA juga sebagai sumber tertib hukum pertanahan secara nasional, yang harus mewujudkan penjelmaan dari ketuhanan Yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, serta khususnya harus merupakan pelaksanaan daripada ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara yang tercantum dalam manifesto politik Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 1959 dan ditegaskan dalam pidato 17 Agustus 1960. UUPA mengakhiri dualisme hukum agraria yang sebelumnya berlaku di Negara Indonesia, yakni hukum barat yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Tanah Adat yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum penduduk sipil (adat) Indonesia.

Pada zaman orde baru atau zaman pembangunan nasional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dengan susunan ekonomi yang berkembang adalah dominasi imperialisme (kapitalisme monopoli), Kemiskinan dan terpinggirkannya hak-hak masyarakat, termasuk didalamnya masyarakat adat karena ketidakadilan dalam akses untuk memperoleh dan memanfaatkan tanah dan sumber-sumber agraria lainnya mengarahkan pemerintah untuk mengagendakan *Agrarian reform* atau pembaharuan agraria dengan dua arah pokok yaitu keadilan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>4</sup> Pembaharuan Agraria sebagai agenda politik, diperlukan selama sebagian besar penduduk Indonesia di pedesaan bermata pencaharian sebagai petani. Tujuan Pembaharuan agraria pada prinsipnya untuk menata kembali struktur kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan sumber-sumber agraria/sumber daya alam menuju terciptanya pengelolaan sumber-sumber agraria/sumber daya alam yang adil, berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut tergambar dari isi Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang merupakan landasan, dasar dan arah dalam pelaksanaan pembaharuan agraria, pengelolaan sumber daya alam dan penanganan konflik dalam perolehan dan pemanfaatan sumber daya agraria. Ada dua bagian pokok yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembaharuan agraria yaitu aspek penguasaan dan kepemilikan serta aspek penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Tanah obyek landreform adalah tanah yang terkena ketentuan landreform antara lain tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, tanah swapraja, dan bekas swapraja dan tanah negara lainnya yang dikuasai oleh negara yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai obyek landreform yang selanjutnya akan didistribusikan kepada penggarap yang memenuhi persyaratan. Di Wilayah Kabupaten Mempawah masih banyak terdapat tanah negara yang

---

<sup>4</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta:Kompas, 2009) hal 69

telah digarap petani dengan cara membuka lahan hutan, hal tersebut menjadi alasan Pemerintah untuk melakukan kebijakan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di wilayah Kabupaten Mempawah. Pemerintah memberikan kemudahan dalam pengurusan sertifikat tanah dan meringankan pembiayaannya dengan mendaftarkan tanahnya melalui kegiatan Redistribusi TOL.

Pelaksanaan Program Redistribusi TOL disamping untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemiliknya dan membantu masyarakat petani golongan ekonomi lemah untuk memperoleh tanah dan mensertifikatkannya dengan biaya murah karena adanya subsidi dari pemerintah. Adapun tujuan Redistribusi TOL Terciptanya pengaturan dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal dan berkeadilan. Pelaksanaan Program Redistribusi TOL di Kabupaten Mempawah telah dilaksanakan beberapa tahun dengan nama kegiatan yang berubah sesuai kebijakan Pemerintah. Pelaksanaan program tersebut bertujuan tertib administrasi dan tertib hukum pertanahan, dan dengan alasan bahwa;

1. Banyaknya masyarakat tani yang belum mempunyai tanah;
2. Banyaknya masyarakat tani miskin yang tidak mampu membayar biaya pengurusan Sertifikat.
3. Untuk mensukseskan reforma agraria.

Kabupaten Mempawah sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan Program Redistribusi Tanah Obyek Landreform, oleh karena masih banyak petani golongan lemah yang menggarap tanah negara dan tidak mampu mensertifikatkan tanahnya karena keterbatasan dana. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mensukseskan Program Pembaharuan Agraria Nasional yang sedang dilaksanakan Pemerintah. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apakah program Redistribusi Tanah Obyek landreform di Kabupaten Mempawah mampu mendorong pemerataan pemilikan tanah, dan untuk mengetahui pola yang diterapkan serta upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah dalam mewujudkan pemerataan pemilikan tanah,

### **Permasalahan**

Apakah dengan adanya Program Redistribusi Tanah mendorong terciptanya pemerataan kepemilikan tanah di Kabupaten Mempawah?

### **Pembahasan**

## **Program Redistribusi Tanah Mendorong Terciptanya Pemerataan Kepemilikan Tanah Di Kabupaten Mempawah.**

Tanah merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki arti penting dalam kehidupan umat manusia. Tanah di Indonesia dikuasai secara turun-temurun dalam konsep individualistik komunalistik religius. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat UUPA sebagai bentuk unifikasi hukum tanah nasional di Indonesia, lahir pada tanggal 24 September 1960 setelah 15 tahun Republik Indonesia Merdeka. Salah satu tujuan yang hendak dicapai ialah menuju kepastian hukum hak atas tanah.

Apabila kita runut kembali, lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, maka tujuan yang hendak ditekankan adalah aspek yang adil bagi semua warga negara terhadap tanah, yang kemudian diwujudkan dalam strategi landreform melalui pelaksanaan redistribusi tanah. Landreform menjadi jalan yang logis untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah serta merupakan sarana untuk menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran. Berbagai peraturan perundang-undangan kemudian dikeluarkan sebagai tindak lanjut dan Undang-Undang Pokok Agraria, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Adapun upaya untuk menata struktur agraria pada era orde lama akhirnya kandas, sebagai akibat terjadinya prahara politik di tahun 1965, sehingga struktur agraria di Indonesia praktis tidak banyak berubah sampai sekarang.

Di era orde baru kebijaksanaan landreform kemudian dijalankan kembali, namun karena pada periode ini kebijakan pertanahan lebih ditujukan untuk melakukan suatu pembangunan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan tertentu, maka program redistribusi menjadi terabaikan, bahkan yang lebih ironis, konsep-konsep pembangunan “ala orde baru” ternyata jauh dan bertentangan dengan jiwa dan semangat UUPA.

Program *landreform* atau lebih populer dengan Redistribusi Tanah Pertanian Negara secara singkat dapat didefinisikan<sup>5</sup> sebagai kebijakan dan kegiatan pemerintah

---

<sup>5</sup> Landreform secara universal/intern nasional dipahami sebagai bagian dari agrarian reform dan bukan kegiatan parsial apalagi bersifat proyek “bagi bagi Tanah”, melainkan menuju ke arah perombakan struktur penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menghilangkan hambatan-hambatan yang mengganjal para petani menuju kesejahteraan sosial dan ekonominya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) misalnya mendefinisikan *landreform* sebagai berikut: “*Landreform refers to the integral reform of tenur production and supporting services structure to eliminate obstacles, to economic and social development arising out of defects in agrarian structure, by redistribution of wealth, opportunity and power, as manifest in the ownership and control of*

meredistribusikan tanah-tanah pertanian negara kepada para petani berlahan sempit (petani gurem) dan terutama petani penggarap yang tidak memiliki tanah. Jadi, obyek tanah redistribusi atau “tanah redis” adalah tanah pertanian yang sudah berstatus tanah negara dan telah dinyatakan secara resmi oleh pemerintah/BPN sebagai “tanah obyek landreform”.

Dikatakan program redistribusi dan bukan program distribusi, karena tanah-tanah obyek landreform yang sudah berstatus tanah negara tersebut bisa berasal dari beberapa kemungkinan berikut :

- Tanah negara bebas, yaitu: tanah jenis ini antara lain bisa berasal dari tanah bekas perkebunan swasta asing pada zaman pemerintahan Hindia Belanda yang dinasionalisasi oleh UUPA, misalnya bekas tanah hak *erfpacht* (semacam tanah Hak Guna Usaha). Untuk tanah demikian para petani penerima “tanah redistribusi” bisa memperolehnya secara gratis untuk luas dua hektar atau kurang sejak 1 Juli 1998 atau sejak berlakunya ketentuan dalam Peraturan Kepala BPN No.4 Tahun 1998, yang menggantikan ketentuan sebelumnya yang telah berusia hampir seperempat abad yakni Peraturan Mendagri No.1 Tahun 1975; atau
- Tanah negara sebagai hasil pembebasan (dengan pembayaran ganti kerugian atas) tanah-tanah kelebihan, tanah guntai dan tanah terlantar Untuk memperoleh tanah negara demikian para petani penerima “tanah redis” tentunya tidak bisa secara gratis sebab harus membayar kembali uang pengganti yang telah dikeluarkan pemerintah ditambah 10%, tapi bisa diangsur dengan memperhitungkan bunga bank; tanah jenis demikian semakin jarang sekali terjadi.
- Tidak setiap anggota masyarakat bisa memenuhi persyaratan sebagai calon penerima tanah redistribusi. Kriterianya memang cukup ketat, dan diranking menurut golongan prioritasnya dari tertinggi hingga terendah sebagai berikut:
  - 1) penggarap tanah bersangkutan yang telah mengerjakan tanah tersebut sekurang-kurangnya selama tiga tahun atau lebih;
  - 2) buruh tani tetap pada bekas pemilik yang telah mengerjakan tanah tersebut sekurang-kurangnya tiga tahun berturut-turut;
  - 3) pekerja tetap pada bekas pemilik tanah;
  - 4) penggarap yang telah mengerjakan tanah tersebut kurang dari tiga tahun tetapi telah mengerjakan tanah tersebut sekurang-kurangnya dalam dua musim berturut-turut

- 5) penggarap yang mengerjakan tanah-tanah milik bekas pemilik tanah dan yang telah mengerjakan tanah tersebut sekurang-kurangnya tiga tahun berturut-turut;
- 6) penggarap tanah-tanah bekas tanah Swapraja yang telah mengerjakan tanah tersebut sekurang-kurangnya tiga tahun berturut-turut;
- 7) penggarap yang tanah garapannya kurang dari setengah hektar;
- 8) petani pemilik yang kepemilikannya kurang dari setengah hektar; dan
- 9) petani atau buruh tani lainnya.

Untuk masing-masing golongan prioritas di atas, masih dikenakan lagi kriteria tambahan berupa pengutamaan terhadap:

- petani yang mempunyai ikatan keluarga dengan bekas pemilik sejauh tidak lebih dari dua derajat, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya lima orang;
- petani yang terdaftar sebagai Veteran;
- petani janda pejuang kemerdekaan yang gugur; dan
- petani yang menjadi korban kekacauan (misal korban pada zaman revolusi kemerdekaan).

Kesemua golongan prioritas dan golongan pengutamaan tersebut masih harus memenuhi persyaratan umum yaitu: WNI, bertempat tinggal di dalam wilayah Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan, dan masih kuat bekerja dalam pertanian. Yang dimaksud dengan “petani” tentu saja adalah orang yang pokok pencahariannya adalah bertani, baik mempunyai tanah atau tidak mempunyai tanah. Sedangkan yang dimaksudkan dengan “penggarap”, adalah petani juga hanya saja tanah yang diusahakannya secara aktif dan sah itu bukanlah miliknya, baik turut maupun tidak turut menanggung risiko produksinya. “Buruh tani tetap” adalah petani yang mengerjakan tanah orang lain secara terus-menerus dengan memperoleh upah. Sementara yang dimaksudkan dengan “pekerja tetap” adalah orang yang bekerja pada keluarga bekas pemilik tanah secara terus-menerus.

Menurut penulis urutan golongan prioritas dan urutan pengutamaan untuk setiap golongan prioritas di atas, lebih ditujukan kepada adanya pertimbangan rasa keadilan sosial sekaligus penghormatan terhadap hubungan kekerabatan antara petani dengan keluarga bekas pemilik tanah. Program landreform yang dikonsepskan seperti itu, hemat penulis merupakan salah satu contoh kebijakan keagrariaan yang khas dan kental dengan nilai-nilai adat yang bernilai tinggi ke-Indonesia-an, dan tidak terjerumus ke dalam peniruan model-model sosialisme maupun liberalismenya negara-negara lain. Pantas kalau PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang



notabene produk hukum yang sudah berumur 41 tahun masih dianggap representatif menjadi acuan pelaksanaan redistribusi tanah hingga saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui tata cara permohonan dan pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah yang akan diuraikan dalam langkah-langkah sebagai berikut:

**LANGKAH-1:** Dengan bantuan Kepala Desa mengusahakan untuk memperoleh SIM (Surat Ijin Menggarap) atas Tanah-tanah negara yang telah dinyatakan pemerintah/BPN sebagai Tanah Obyek Landreform; SIM tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

**LANGKAH-2:** Atas permintaan masyarakat Kepala Desa/lurah akan melayangkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan berisikan usulan pemberian hak milik atas bidang-bidang tanah obyek landreform untuk pemohon.

**LANGKAH-3:** Menerima langsung Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Obyek Landreform dari Kepala Kantor Pertanahan. Sampai langkah ini masyarakat yang menerima redistribusi tanah baru menjadi penerima hak milik dan belum menjadi pemegang hak milik.

**LANGKAH-4:** Mendaftarkan tanah hak milik tanah tersebut kepada Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (Seksi P2T) pada Kantor Pertanahan agar memperoleh sertifikat hak milik, dengan membawa SK Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara Obyek Landreform sebagai dasar untuk mendaftarkan tanah tersebut. Dengan telah diterbitkannya sertifikat tanah ini maka barulah berhak menyandang predikat pemegang hak atau pemilik tanah yang “paling sah”.

**LANGKAH-5:** Menunggu terbitnya sertifikat hak milik atas tanah dari Kantor Pertanahan. <sup>6</sup>

Keadaan tanah obyek landreform yang telah didistribusikan di Kabupaten Mempawah dewasa ini telah mengalami perubahan fungsi dari tanah lahan pertanian menjadi lahan pekarangan/pemukiman. Keadaan ini hampir 100 % telah berubah.

Hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

1. Karena perkembangan kota obyeknya berubah dari lahan pertanian menjadi lahan pekarangan/pemukiman.
2. Karena pewarisan maka kepemilikannya beralih.
3. Karena obyek redistribusi tanah tersebut telah diperjual-belikan.

---

<sup>6</sup> Wawancara pribadi dengan.....selaku Kasi Pendaftaran Tanah, BPN Kabupaten Mempawah

Status kepemilikan tanah hasil redistribusi tanah yang pernah dilakukan di Kabupaten Mempawah dewasa ini tidak lagi dimiliki oleh para petani penggarap, hampir sebagian besar telah beralih kepemilikannya dan tidak lagi difungsikan sebagai lahan pertanian akan tetapi telah berubah menjadi pemukiman.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa bidang-bidang tanah hasil redistribusi tanah tersebut bahkan telah berkali-kali mengalami peralihan hak (5-6 kali peralihan hak).

Proses peralihan haknya dilakukan dengan cara:

- Sebagian besar melalui jual beli yang dilakukan di bawah tangan;
- Melalui pewarisan.

Berdasarkan hasil penelitian perubahan fungsi obyek redistribusi tanah tersebut secara prosedural dapat dilakukan dengan cara memperoleh izin perubahan penggunaan tanah, maka tanah tersebut harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum menjadi tanah pekarangan.

Adapun proses pendaftaran hak atas tanah redistribusi yang telah berubah pemanfaatannya tersebut, misalnya menjadi lahan pekarangan/ perumahan maka berdasarkan SK. BPN Nomor 11 Tahun 1997 tanah tersebut dikeluarkan dulu dari Tanah Obyek Landreform.

Prosedurnya adalah sebagai berikut:

- Pemilik tanah mengajukan permohonan hak kepada Kantor Pertanahan;
- Kantor Pertanahan kemudian mengadakan penelitian apabila dilapanganternyata tanahnya berubah pemanfaatannya menjadi lahan pekaranganatau pemukiman, maka:
- Pemilik mengajukan permohonan pengeluaran tanah tersebut dari obyek landreform;
- Kantor Pertanahan mengeluarkan Surat Keputusan baru untuk mencabut Surat Keputusan yang lama;
- Kemudian diterbitkannya Surat Konfirmasi penguasaan tanah obyek landreform;
- SK baru dan Surat Konfirmasi penguasaan tanah obyek landreform dipakai untuk kelengkapan berkas permohonan hak atas tanah negara;
- Penerbitan Sertipikat

Perubahan fungsi obyek redistribusi tanah di Kabupaten Mempawah menurut penulis secara yuridis dimungkinkan untuk terjadi. Apabila kita cermati ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964, yang merupakan payung hukum pelaksanaan redistribusi tanah di Indonesia tidak ditemui ketentuan yang melarang peralihan kepemilikan dan fungsi tanah obyek redistribusi tanah tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi, tanah yang diperoleh oleh petani penggarap penerima redistribusi tanah akan diberikan status Hak Milik.

Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi menyebutkan bahwa Pemberian hak milik tersebut akan dilakukan dengan surat-keputusan Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan disertai dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a. membayar harga tanah yang bersangkutan menurut ketentuan .
- b. tanah itu harus dikerjakan/diusahakan oleh pemilik sendiri secara aktif.
- c. setelah 2 tahun sejak tanah tersebut diberikan dengan hak milik, setiap tahunnya harus dicapai kenaikan hasil tanaman sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah.
- d. harus menjadi anggota koperasi termaksud dalam Pasal 17.

Selanjutnya Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi menyebutkan bahwa selama harga tanah yang dimaksud di atas belum dibayar lunas, maka hak milik tersebut dilarang dipindahkan kepada orang lain, kecuali dengan izin Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa obyek redistribusi tanah yang telah diterima oleh petani penggarap secara yuridis dapat dipindah tangankan kepemilikannya setelah memenuhi persyaratanpersyaratan yang telah diuraikan diatas. Pemberian hak milik yang merupakan “hak tertinggi dan mutlak” dalam pembagian hak-hak atas tanah di Indonesia dan diterbitkannya sertipikat tanah sebagai tanda kepemilikan tanah yang sah terhadap tanah-tanah obyek redistribusi tanah secara hukum memberikan kewenangan penuh dan hak kepada pemiliknya. Sehingga pemilik tanah mempunyai hak untuk mengalihkan kepemilikan tanah tersebut.

Kondisi inilah menurut penulis yang menyebabkan dikemudian hari sangat dimungkinkan terjadinya peralihan kepemilikan tanah obyek redistribusi tanah tersebut. Karena secara hukum tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar apabila hal tersebut dilakukan dan tidak ada sanksi hukumnya. Perubahan kepemilikan dan fungsi tanah hasil pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Mempawah semakin terbuka lebar untuk terjadi karena terjadinya berbagai perubahan dalam masyarakat, baik secara politis, maupun sosial-ekonomis. Kondisi ini akan berdampak terjadinya perubahan fungsi peruntukan tanah dari lahan pertanian menjadi lahan untuk kawasan pemukiman.

Walaupun secara yuridis peralihan kepemilikan tanah obyek redistribusi dimungkinkan untuk terjadi dan peralihan tersebut akan dapat berdampak kepada terjadinya perubahan fungsi tanah pertanian, menurut penulis hal ini bila ditinjau dari historis hukum pelaksanaan redistribusi tanah yang merupakan bagian dari program landreform di Indonesia sangatlah bertentangan dengan maksud dan tujuan negara untuk menyelenggarakan program landreform.

Tujuan program landreform tersebut adalah untuk memproduktifkan penggunaan tanah-tanah pertanian dan meningkatkan kesejahteraan para petani serta tujuan-tujuan lain yang berdimensikan keadilan dan pemerataan dalam hal penguasaan sumber-sumber daya ekonomi seperti tanah pertanian.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian sebagai salah satu dasar hukum dari pelaksanaan redistribusi tanah dapat diketahui arti penting peruntukan tanah bagi peningkatan kesejahteraan para petani, yaitu dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5/1960) menetapkan dalam Pasal 7, bahwa agar supaya tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan pengusahaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Keadaan masyarakat tani Indonesia sekarang ini ialah, bahwa kurang lebih 60% dari para petani adalah petani-tidak-bertanah.

Sebagian mereka itu merupakan buruh tani, sebagian lainnya mengerjakan tanah orang lain sebagai penyewa atau penggarap dalam hubungan perjanjian bagi hasil. Para petani yang mempunyai tanah (sawah dan/atau tanah kering) sebagian terbesar masing-masing tanahnya kurang dari 1 hektar (rata-rata 0,6 ha sawah atau 0,5 ha tanah kering) yang terang tidak cukup untuk hidup yang layak. Tetapi di samping petani-petani yang tidak bertanah dan yang bertanah-tidak-cukup itu, dijumpai petani-petani yang menguasai tanah-tanah pertanian yang luasnya berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu hektar. Tanah-tanah itu tidak semuanya dipunyai mereka dengan hak milik, tetapi kebanyakan dikuasainya dengan hak gadai atau sewa. Bahkan Tanah-tanah yang dikuasai dengan hak gadai dan sewa inilah merupakan bagian yang terbesar.

Mengenai tanah-kering, yang mempunyai lebih dari 10 hektar adalah 11.000 orang, diantaranya 2.700 orang yang mempunyai lebih dari 20 hektar. Tetapi menurut kenyataannya jauh lebih banyak jumlah orang yang menguasai tanah lebih dari 10 hektar

---

<sup>7</sup> Herman Het, *Op. Cit.*, Hal.197

dengan hak-gadai atau sewa. Tanahtanah itu berasal dari tanah-tanah kepunyaan para tani yang tanahnya tidak cukup tadi, yang karena keadaan terpaksa menggadaikan atau menyewakan kepada orang-orang yang kaya tersebut. Biasanya orang-orang yang menguasai tanah-tanah yang luas itu tidak dapat mengerjakan sendiri. Tanah-tanahnya dibagi hasilkan kepada petani-petani yang tidak-bertanah atau yang tidak cukup tanahnya. Bahkan tidak jarang bahwa dalam hubungan gadai para pemilik yang menggadaikan tanahnya itu kemudian menjadi penggarap tanahnya sendiri sebagai pembagi-hasil. Dan tidak jarang pula bahwa tanah-tanah yang luas itu tidak diusahakan (“dibiarkan terlantar”) oleh karena yang menguasainya tidak dapat mengerjakan sendiri, hal mana terang bertentangan dengan usaha untuk menambah produksi bahan makanan.

Bahwa ada orang-orang yang mempunyai tanah yang berlebih-lebihan, sedang yang sebagian besar lainnya tidak mempunyai atau tidak cukup tanahnya adalah terang bertentangan dengan azas sosialisme Indonesia, yang menghendaki pembagian yang merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah itu, agar ada pembagian yang adil dan merata pula dari hasil tanah-tanah tersebut. Dikuasainya tanah-tanah yang luas ditangan sebagian kecil para petani itu membuka pula kemungkinan dilakukannya praktek-praktek pemerasan dalam segala bentuk (gadai, bagi-hasil dan lainlainnya), hal mana bertentangan pula dengan prinsip sosialisme Indonesia.

Dewasa ini jumlah rumah tangga buruh tani dan petani gurem (yang memiliki tanah pertanian setengah hektar atau kurang) di Indonesia memperlihatkan tren yang meningkat. Direktur Eksekutif *Center for Agricultural Policy Studies* (CAPS) H.S. Dillon dan Sekretaris CAPS yang disampaikan melalui makalahnya pada seminar BPS di Jakarta, misalnya, mengungkapkan perkiraannya bahwa, jumlah rumah tangga buruh tani yang pada tahun 1983 berjumlah 5,032 juta, pada tahun 1993 meningkat tajam menjadi 9,054 juta. Demikian pula dengan petani gurem, yang pada tahun 1983 berjumlah 9,5 juta, pada tahun 1993 meningkat menjadi 10,09 juta.

Laju pengurangan luas areal sawah di Indonesia pertahunnya diperkirakan antara 25.000 hingga 40.000 hektar pertahunnya yang jauh di atas kemampuan program/proyek pencetakan sawah baru oleh Pemerintah. Jumlah pekerja di sektor pertanian di Indonesia hingga kini masih merupakan bagian terbesar dari seluruh pekerja. Bahkan jumlah absolut maupun persentasenya semakin meningkat. Misalnya, pada tahun 1997 jumlah pekerja di sektor pertanian adalah 34,8 juta atau 39% dari keseluruhan tenaga kerja yang berjumlah

89,6 juta orang. Sedangkan pada tahun 1998, jumlah pekerja di sektor pertanian tersebut menjadi 39,4 juta atau 42% dari keseluruhan tenaga kerja yang berjumlah 92,7 juta orang.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut penulis perlu diambil upaya-upaya hukum yang kongkrit untuk mencegah terjadinya perubahan peruntukan lahan pertanian untuk kepentingan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi fenomena berkurangnya lahan pertanian setiap tahunnya di Indonesia. Untuk itu pembaharuan berbagai peraturan hukum yang terkait dengan program landreform umumnya dan khususnya mengenai redistribusi tanah di Indonesia perlu segera dilakukan.

---

<sup>8</sup> Herman Hermit, *Op. Cit.* Hal. 206